LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR KOTA PASURUAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025

Nomor : 00247/3.0290/AU.2/07/1070-1/1/IV/2026

Tanggal : 1 April 2026

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .....

SURAT PERNYATAAN DIREKSI .....

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....

LAPORAN KEUANGAN:

1. Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2025 dan 2024 1
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 2
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 3
4. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. 4

Catatan Atas Laporan Keuangan ..... 5 – 34

Lampiran 1. Rincian Kredit yang Diberikan Jenis Penggunaan Berdasarkan Kualitas 35

Lampiran 2. Daftar Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Kolektibilitas..... 36 - 39

Lampiran 3. Kualitas Aset Produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 40

Lampiran 4. Aset Tertimbang Menurut Risiko..... 41 - 42

Lampiran 5. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 43

Lampiran 6. Rasio Perhitungan Kesehatan Bank 44

PT. BPR
KOTA PASURUAN
(PERSERODA)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025,
SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Iswinarti Margiana, SE
Alamat Kantor	: JL. Panglima Sudirman No. 58 Purworejo Kota Pasuruan
Alamat Domisili/ sesuai KTP	: Pecantingan 011/004 Sekardangan Sidoarjo
Nomor Telepon Kantor	: (0343) 424532
Jabatan	: Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Kota Pasuruan Perseroda;
2. Laporan keuangan PT BPR Kota Pasuruan Perseroda telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Kota Pasuruan Perseroda telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan PT BPR Kota Pasuruan Perseroda tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Kota Pasuruan Perseroda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kami bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal alam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
7. Bertanggung jawab atas hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT BPR Kota Pasuruan Perseroda sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasuruan, 1 April 2026



Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Nomor : 00245/3.0290/AU.2/07/1070-1/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA**, yang terdiri dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan nomor 3.d. atas laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa Entitas telah mengubah kerangka pelaporan keuangannya dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Hal Lain

Laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh Akuntan Publik lain dengan nomor 00020/3.0420/AU.2/07/0388-5/1/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan pendapat wajar.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertangung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan Keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesioanl selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Erfan & Rakhmawan

00245

F. Ahmad Kurniawan, Ak, CA, CPA
NRAP : AP. 1070

Surabaya, 1 April 2026

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	Catatan	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
A S E T:			
Aset Lancar			
K a s	2c. 4	76.189.800	46.375.000
Penempatan pada bank lain	2d. 5	32.914.249.802	22.887.446.771
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		0	0
Kredit yang diberikan	2e. 6	34.966.992.705	39.813.836.697
- Biaya transaksi belum diamortisasi		7.181.138	9.757.729
- Kredit Yang Diberikan - Provisi & Administrasi		(321.865.546)	(358.906.604)
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(2.095.198.682)	(1.185.158.941)
Agunan Yang Diambil Alih	2f. 7	1.033.190.707	1.340.447.932
Jumlah aset lancar		**66.580.739.924**	**62.553.798.584**
Aset tidak lancar			
Aset tetap & Inventaris	2g. 8	2.132.512.609	2.113.189.609
- Akumulasi Penyusutan		(1.697.164.547)	(1.573.557.288)
Aset tidak berwujud	2h. 9	163.133.300	157.633.300
- Akumulasi Amortisasi		(98.788.503)	(87.553.855)
Aset lain-lain	2i. 10	531.343.712	639.511.258
Jumlah aset tidak lancar		**1.031.036.571**	**1.249.223.024**
Jumlah Aset		**67.611.776.495**	**63.803.021.608**
LIABILITAS & EKUITAS			
Liabilitas			
Liabilitas Segera	2j. 11	159.670.613	101.083.139
Simpanan	2k. 12	41.146.089.706	38.149.948.249
Simpanan dari bank lain	2k. 13	14.429.919.651	11.966.219.204
Pinjaman yang diterima	2l. 14	247.633.848	1.237.634.052
Liabilitas lain-lain	2m. 15	1.150.776.086	1.019.078.803
Jumlah Liabilitas		**57.134.089.904**	**52.473.963.447**
Ekuitas			
Modal saham - modal dasar 6.000 saham, dengan nilai nominal Rp 2.500.000,- per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 2.874 saham.	16	7.185.000.000	7.185.000.000
Cadangan Umum		1.906.648.854	1.653.045.341
Cadangan Tujuan		626.736.094	1.222.995.255
Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya		759.301.643	1.268.017.565
Jumlah Ekuitas		**10.477.686.591**	**11.329.058.161**
Jumlah Liabilitas & Ekuitas		**67.611.776.495**	**63.803.021.608**

PT. BPR KOTA PASURUAN
Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

	Catatan	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga :			
Bunga Kontraktual	2n. 17	6.278.413.275	6.643.455.125
Provisi	2o. 18	526.570.810	475.120.172
Biaya Transaksi	2n. 19	(6.747.707)	(13.536.060)
Jumlah Pendapatan Bunga		6.798.236.378	7.105.039.237
Pendapatan Lainnya	2n. 20	1.325.179.717	847.555.756
Jumlah Pendapatan Operasional		8.123.416.095	7.952.594.993
Beban Operasional :			
Beban Bunga	2n. 21	2.538.902.825	2.464.172.486
Beban CKPN	2n. 22	1.232.886.782	453.127.438
Beban Pemasaran	2n. 23	31.436.321	71.249.368
Beban Administrasi dan Umum	2n. 24	3.227.359.441	3.242.018.962
Beban Operasional Lainnya	2n. 25	102.176.878	61.565.983
Jumlah Beban Operasional		7.132.762.247	6.292.134.237
LABA OPERASIONAL		**990.653.848**	**1.660.460.756**
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	2n. 26		
Pendapatan Non operasional		2.055.665	9.761.391
Beban Non Operasional		53.862.706	154.410.600
LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL		(51.807.041)	(144.649.209)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		938.846.807	1.515.811.547
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2p. 27		
Pajak Kini		(179.545.164)	(247.793.982)
Pajak Tangguhan		0	0
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**759.301.643**	**1.268.017.565**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Tidak Akan Direklas Ke Laba Rugi:			
Lainnya		0	0
Akan Direklas Ke Laba Rugi:			
Lainnya		0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		**759.301.643**	**1.268.017.565**

PT. BPR KOTA PASURUAN
Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

U r a i a n	Modal Saham ditempatkan dan disetor penuh	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**7.185.000.000**	**1.370.629.294**	**1.222.995.255**	**1.412.080.235**	**11.190.704.784**
Pembayaran Deviden	0	0	0	(776.644.129)	(776.644.129)
Penambahan Cadangan Umum	0	282.416.047	0	(282.416.047)	0
Dana Kesejahteraan	0	0	0	(141.208.024)	(141.208.024)
Tantiem	0	0	0	(56.483.209)	(56.483.209)
Jasa Produksi	0	0	0	(112.966.419)	(112.966.419)
CSR	0	0	0	(42.362.407)	(42.362.407)
Laba bersih tahun berjalan	0	0	0	1.268.017.565	1.268.017.565
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**7.185.000.000**	**1.653.045.341**	**1.222.995.255**	**1.268.017.565**	**11.329.058.161**
Pembayaran Deviden	0	0	0	(697.409.660)	(697.409.660)
Penambahan Cadangan Umum	0	253.603.513	0	0	253.603.513
Cadangan Tujuan	0	0	(596.259.161)	0	(596.259.161)
Dana Kesejahteraan	0	0	0	(126.801.757)	(126.801.757)
Tantiem	0	0	0	(50.720.703)	(50.720.703)
Jasa Produksi	0	0	0	(101.441.405)	(101.441.405)
CSR	0	0	0	(291.644.040)	(291.644.040)
Laba bersih tahun berjalan	0	0	0	759.301.643	759.301.643
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	**7.185.000.000**	**1.906.648.854**	**626.736.094**	**759.301.643**	**10.477.686.591**

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	6.278.413.275	6.643.455.125
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	526.570.810	475.120.172
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	269.217.871	212.053.114
Pendapatan operasional lainnya	1.049.214.139	621.966.582
Pembayaran beban bunga	(2.538.902.825)	(2.464.172.486)
Beban gaji dan tunjangan	(2.211.244.204)	(2.031.082.446)
Beban umum dan administrasi	(1.016.115.237)	(1.210.936.516)
Beban operasional lainnya	(1.366.499.981)	(585.942.789)
Pendapatan non operasional lainnya	2.055.665	9.761.391
Beban non operasional lainnya	(53.862.706)	(154.410.600)
Pembayaran pajak penghasilan	(179.545.164)	(247.793.982)
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(2.500.000.000)	(2.100.000.000)
Kredit yang diberikan	5.722.419.266	1.418.685.513
Agunan yang diambil alih	307.257.225	(348.768.484)
Aset lain-lain	108.167.546	(204.159.625)
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	58.587.474	(42.524.080)
Tabungan	(423.853.117)	1.597.084.635
Deposito	3.419.994.574	472.558.343
Simpanan dari bank lain	2.463.700.447	311.115.584
Pinjaman yang diterima	(990.000.204)	(990.000.204)
Liabilitas imbalan kerja	46.391.858	(38.269.745)
Liabilitas lain-lain	85.305.425	7.853.158
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	**9.057.272.137**	**1.351.592.660**
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(19.323.000)	(30.537.000)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	(5.500.000)	0
Penyesuaian lainnya	134.841.907	137.774.659
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	**110.018.907**	**107.237.659**
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Pembayaran dividen	(697.409.660)	(776.644.129)
Penyesuaian lainnya (cadangan umum)	(913.263.553)	(353.020.059)
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	**(1.610.673.213)**	**(1.129.664.188)**
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	**7.556.617.831**	**329.166.131**
Kas dan setara Kas awal periode	**15.333.821.771**	**15.004.655.640**
Kas dan setara Kas akhir periode	**22.890.439.602**	**15.333.821.771**

PT. BPR KOTA PASURUAN Perseroda

Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1 U M U M

a. Pendirian

PT. BPR Kota Pasuruan berdiri melalui akuisisi dari PT. BPR Artha Nyata Bangil dengan Akta Notaris Widajati Soedjoko Hariadhi, SH Nomor 9 Oktober 2001 dan Akta Notaris Widajati Soedjoko Hariadhi, SH Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2002. Akta Tersebut telah telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesai Nomor AHU-59049.AH.01.02.Tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat perubahan akta perusahaan yaitu Akta Nomor 17 Tanggal 20 November 2024 Tentang Pengangkatan Komisaris Utama yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, S.H.M,Kn di Kota Mojokerto. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074386.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 20 November 2024.

Pada tahun 2025 terdapat perubahan akta perusahaan. Perubahan terakhir adalah Akta Nomor 41 Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Perubahan Nama Bank menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat BPR Kota Pasuruan Perseroda atau disingkat PT BPR Kota Pasuruan Perseroda, yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH, M.Kn di Kota Mojokerto. Akta tersebut telah mendapat pengesahaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000495.AH.01.02Tahun 2025 Tanggal 08 Januari 2025. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Entitas merupakan Badan Usaha Milik Daerah (Perseroda) yang pengelolaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

b. Perijinan yang dimiliki

Perijinan yang dimiliki Bank sampai saat ini adalah :

1 Ijin Usaha sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-604/KM.13/1990 tanggal 10 Desember 1990

2 Bank Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 0014 6791 2065 1000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pasuruan

3 Ijin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403712649 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS pada tanggal 24 Juli 2019

c. Maksud dan tujuan

Berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 24 Desember 2024 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn di Kota Mojokerto, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat.

d. Susunan pengurus

2025 & 2024

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 20 November 2024 oleh Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn di Mojokerto dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074386.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 20 November 2024, Susunan Pengurus PT. BPR Kota Pasuruan Perseroda per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : Mohammad Agus Fadjar, S.STP,MM.
Komisaris : Ir. Sugiarti, M.Si.
Direktur Utama : Iswinarti Margiana, SE
Direktur : Hafit Wahyudi, SE

e. Lokasi Bank

Bank berkantor pusat di Jl. Panglima Sudirman No. 58, Pasuruan, Jawa Timur.
Bank memiliki 3 (Tiga) kantor kas, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Keterangan	Izin	Lokasi
1	Kantor Kas Pasar Besar	No. 8/230/DPBPR/IDABPR/MI Tanggal 26 April 2006	Jl. Soekarno Hatta Pasuruan (Komplek Pasar Besar) Ruko B No. 01
2	Kantor Kas Pasar Karangketug	No. 8/684/DPBPR/IDABPR/MI Tanggal 19 Desember 2006	Jl. Gatot Subroto, Pasuruan (Komplek Pasar Karangketug) No. 06-07
3	Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Sentra UMKM Kota Pasuruan	Telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat nomor 443/SPB/423.500.02/2023 tanggal 09 Oktober 2023	Jl. Wachid Hasyim Kota Pasuruan (Komplek Mall Pelayanan Publik)

f. Jumlah Karyawan

Sumber daya manusia bank sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) orang Karyawan, dan 2 (Dua) orang Direksi dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Bidang Tugas Karyawan	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		
			Tetap (1)	Tidak Tetap (2)	Total (1+2)
1	Direktur Utama	S1	0	1	1
2	Direktur	S1	0	1	1
3	Audit Internal	S1	1	0	1
4	Kepatuhan	S1	1	0	1
5	Proses Data Elektronik	S1	2	0	2

No.	Bidang Tugas Karyawan	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		
			Tetap (1)	Tidak Tetap (2)	Total (1+2)
6	Pemasaran	S1	6	0	6
		Diploma	0	0	0
		SMA	1	0	1
7	Operasional	S1	3	1	4
		SMA	1	2	3
8	Umum	S1	1	0	1
		SMA	0	6	6
	Total		16	11	27

2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh.

Laporan keuangan BPR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Sedangkan untuk periode perbandingan, yaitu laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang efektif per 1 Januari 2025 serta mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR). Penyusunan ini juga kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Operasional BPR. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa aset dan liabilitas tertentu yang diukur berdasarkan nilai wajar, serta disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha dan dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2025, Entitas telah beralih dari metode penyisihan minimum berdasarkan persentase regulator (PPKA) menjadi model kerugian yang telah terjadi (incurred loss model) yang didasarkan pada bukti objektif penurunan nilai. Pengukuran penurunan nilai dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan. Dalam penerapannya, perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kolektif dan individual sesuai dengan karakteristik aset keuangan yang dimiliki.

b. Transaksi hubungan istimewa

Sesuai dengan SAK EP Bab 33, Bank mengungkapkan hubungan, transaksi, dan saldo luar biasa dengan pihak-pihak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan terhadap Bank, termasuk anggota manajemen kunci yang terdiri atas:

a. Pemegang Saham Pengendali (PSP).
b. Anggota Manajemen Kunci (Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif).
c. Keluarga dekat dari individu tersebut.
d. Perusahaan yang dimiliki atau dipengaruhi secara signifikan oleh individu di atas (Afiliasi).

Sesuai dengan SEOJK No. 11 Tahun 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Bank wajib mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Pihak Terkait. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length basis) dengan syarat dan ketentuan yang setara dengan pihak ketiga. Bank wajib mematuhi batas konsentrasi risiko sebagai berikut:

a. Total pemberian kredit kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal BPR.
b. Pelanggaran atau pelampauan atas batas ini wajib dilaporkan kepada OJK dan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Seluruh kredit yang diberikan kepada pihak berelasi diklasifikasikan sebagai Lancar berdasarkan kriteria 3 pilar (Prospek Usaha, Kinerja Debitur, dan Kemampuan Membayar) sesuai POJK No. 1/2024. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah dibentuk

c. Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas pada bank termasuk kas besar dan kas kecil. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (commemorative coins/notes), dan mata uang emas. Kas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

d. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain merupakan penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Penempatan ini dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan evaluasi kualitas aset berdasarkan POJK Nomor 1/2024, Bank menetapkan kualitas penempatan pada bank lain menjadi golongan Lancar, Kurang Lancar, atau Macet berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga serta kondisi keuangan bank penerima penempatan, di mana pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada hasil evaluasi bukti objektif atas penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan.

e. Kredit yang diberikan

2025

Kredit yang diberikan diakui pada saat dana disalurkan kepada debitur atau pihak lain berdasarkan kesepakatan kontraktual. Pada pengakuan awal, kredit diukur pada harga transaksi yang mencakup nilai pokok kredit ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya notaris, biaya pengikatan agunan, dan biaya asuransi yang dibayarkan oleh Bank. Setelah pengakuan awal, kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan Metode Suku Bunga Efektif (EIR), di mana provisi dan biaya administrasi yang diterima di muka dikurangkan dari nilai tercatat awal dan diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit sebagai penyesuaian terhadap imbal hasil efektif.

Sesuai dengan POJK No. 1/2024, Bank melakukan penilaian kualitas kredit berdasarkan tiga pilar utama, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar, dengan klasifikasi yang terdiri dari Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Bank melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan adanya bukti objektif penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif tersebut, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskon menggunakan suku bunga efektif awal. Selain itu, Bank wajib mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 7 Tahun 2024 untuk membatasi konsentrasi risiko pada satu debitur atau kelompok debitur terkait.

Dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Entitas membedakan metode perhitungan berdasarkan pendekatan kolektif dan individual. CKPN secara kolektif dihitung menggunakan parameter Probability of Default (PD) yang ditentukan melalui metode migration analysis, serta Loss Given Default (LGD) yang diestimasi berdasarkan expected recovery. Sementara itu, CKPN secara individual ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:

- kredit dengan kualitas 3,4, dan 5, atau kredit dengan frekuensi hari mengunggak lebih dari 90 hari, akan tetapi BPR memperoleh "bukti obyektif" yang telah diverifikasi.
- Memiliki baki debet ≥ 1.000.000.000 dan/atau yang termasuk ke dalam 25 debitur terbesar.
- Memiliki agunan yang dijaminkan dengan nilai taksasi pasar sekurang-kurangnya 50% dari nilai baki debet kredit.

2024

Aset Produktif terdiri dari kredit yang diberikan, Sertifikat Bank Indonesia, Penempatan pada Bank lain (tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis).

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan, komitmen dan kontijensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan penyisihan penghapusan aset produktif (PPKA) ditentukan berdasarkan POJK Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

Penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di Bank lain.

Aset produktif dihapuskan dan penyisihan penghapusan aset produktif pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur atau Bank lain tempat menempatkan dana sudah tidak mampu lagi membayar.

Klasifikasi Aset Produktif dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi / Kualitas Kredit	Prosentase	Keterangan
PPKA Umum		
- Lancar	0,5%	Dari nilai aset produktif kualitas Lancar
PPKA Khusus		
- Dalam Perhatian Khusus	3%	Dari aset produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- Kurang Lancar	10%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- Diragukan	50%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- Macet	100%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan

Penetapan nilai Agunan di klasifikasikan sebagai berikut:

No	Keterangan Agunan	Prosentase
a.	Agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Tabungan dan/atau deposito yang diblokir BPR disertai surat kuasa pencairan dan logam mulia yang disetai surat kuasa gadai.	100%
b.	Nilai pasar untuk agunan emas perhiasan.	85%
c.	Nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	80%

No	Keterangan Agunan	Prosentase
d.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilainnya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	70%
e.	Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	60%
f.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi yang berwenang atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang untuk agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.	50%
g.	Harga Pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang.	50%
h.	Nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	50%
i.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	50%
j.	Bagian dari kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perekonomian Rakyat.	50%
k.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	30%

Prosentase PPKA diatas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan OJK kecuali aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Terkait penerapan pasal 20 ayat (3) dan (5) POJK no. 1 tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang kualitas aset Bank Perekonomian rakyat yang menyatakan bahwa:

a. Nilai agunan sebagai pengurang PPKA kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf c,huruf e sampai dengan huruf g:

- Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 tahun sampai dengan 4 tahun sejak penetapan kualifikasi kredit menjadi macet; dan
- Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 tahun sejak penetapan kualifikasi kredit menjadi macet.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal agunan memenuhi persyaratan yaitu:

- agunan berupa tanah dan/atau bangunan memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- agunan dinilai oleh penilai independen yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- nilai hak tanggungan paling sedikit mencakup seluruh jumlah kewajiban debitur kepada BPR.

c. Nilai agunan sebagai pengurang PPKA kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf h:

- ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet, dan
- tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

f. Agunan yang diambil alih

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK no. 1 tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat BAB VI Agunan Yang Diambil Alih :Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) diakui pada saat Bank secara hukum mengambil alih aset agunan debitur sebagai bagian dari penyelesaian seluruh atau sebagian kewajiban kredit yang macet, baik melalui pelelangan maupun penyerahan sukarela. Sesuai dengan SAK EP, pada saat pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai wajar neto, yaitu nilai wajar aset setelah dikurangi dengan estimasi biaya pelepasan (biaya penjualan). Selisih antara nilai tercatat kredit (pokok dan bunga akrual) dengan nilai wajar neto agunan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Setelah pengakuan awal, AYDA tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap dan tidak disusutkan, karena tujuan kepemilikannya adalah untuk segera dijual kembali. Bank melakukan evaluasi berkala atas nilai wajar neto AYDA pada setiap tanggal pelaporan. Jika nilai wajar neto mengalami penurunan di bawah nilai tercatatnya, Bank mengakui kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi. Peningkatan nilai wajar neto di masa depan dapat diakui sebagai pemulihan kerugian hanya terbatas pada akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam POJK No. 1/2024, Bank wajib melakukan upaya penyelesaian (penjualan) AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan. Dalam hal AYDA belum terjual melebihi batas waktu tersebut, Bank tetap menyajikan AYDA di posisi keuangan namun wajib membentuk penyisihan penurunan nilai sesuai dengan jadwal sanksi pemenuhan kualitas aset yang diatur oleh OJK, yaitu:

1. AYDA yang dimiliki sampai dengan 1 tahun: (Minimal sesuai hasil penilaian nilai wajar neto).
2. AYDA yang dimiliki > 1 tahun s.d. 2 tahun: Wajib dibentuk penyisihan minimal 10%.
3. AYDA yang dimiliki > 2 tahun s.d. 3 tahun: Wajib dibentuk penyisihan minimal 30%.
4. AYDA yang dimiliki > 3 tahun s.d. 4 tahun: Wajib dibentuk penyisihan minimal 50%.
5. AYDA yang dimiliki > 4 tahun s.d. 5 tahun: Wajib dibentuk penyisihan minimal 75%.
6. AYDA yang dimiliki lebih dari 5 tahun: Wajib dibentuk penyisihan sebesar 100%.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 7 Tahun 2024 dan peraturan kualitas aset, nilai wajar AYDA harus ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Independen (untuk plafon kredit tertentu sesuai aturan OJK) atau oleh petugas penilai internal Bank yang kompeten dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku umum dan objektif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan AYDA (selisih antara nilai tercatat neto dengan harga jual aktual) diakui dalam laporan laba rugi pada saat transaksi penjualan terjadi. Biaya-biaya yang timbul selama masa kepemilikan AYDA, seperti biaya pemeliharaan, pajak, dan keamanan, dibebankan langsung pada laporan laba rugi periode berjalan.

g. Aset tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Bank untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aset tetap diakui pada saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke Bank dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pada pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

Penyusutan dihitung menggunakan Metode Garis Lurus (Straight-Line Method) untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama estimasi masa manfaat ekonomisnya. Penentuan masa manfaat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan internal Bank serta batasan yang diatur dalam ketentuan perpajakan dan POJK No. 7 Tahun 2024. Estimasi masa manfaat adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Prosentase	Masa Manfaat
Bangunan	5%	20 tahun
Kendaraan	25% dan 12,5%	4 dan 8 tahun
Inventaris	25% dan 12,5%	4 dan 8 tahun

Bank mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa aset tetap mengalami penurunan nilai sesuai SAK EP Bab 17. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut diturunkan nilainya. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul (selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat aset) diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

h. Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud, yang umumnya berupa perangkat lunak (Core Banking System atau aplikasi perbankan lainnya), diakui jika memenuhi kriteria identifikasi, yaitu dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual/hukum lainnya. Sesuai SAK EP Bab 18, aset ini diukur pada biaya perolehan pada saat pengakuan awal. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara internal dalam tahap pengembangan hanya dikapitalisasi jika memenuhi kriteria teknis dan ekonomi tertentu; jika tidak, biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Aset tidak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas. Bank menetapkan masa manfaat perangkat lunak perbankan biasanya berkisar antara 3 hingga 5 tahun, mengingat pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan sesuai dengan fungsinya.

Sejalan dengan prinsip tata kelola dalam POJK No. 7 Tahun 2024, Bank melakukan evaluasi berkala atas estimasi masa manfaat dan metode amortisasi. Jika terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai secara signifikan (misalnya karena perubahan sistem perbankan yang diwajibkan oleh regulator), Bank akan mengakui rugi penurunan nilai untuk menyesuaikan nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan.

i. Aset Lain-lain

Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan tagihan bunga yang telah menjadi hak Bank atas penggunaan dana oleh debitur yang belum dibayar oleh debitur pada tanggal pelaporan. Sesuai dengan SAK EP, piutang bunga ini diakui secara akrual berdasarkan penggunaan metode suku bunga efektif (EIR) selama kredit tersebut diklasifikasikan dalam kualitas Lancar. Penilaian atas piutang bunga ini dilakukan secara periodik bersamaan dengan penilaian nilai tercatat pokok kreditnya.
Mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam POJK No. 1/2024 tentang Kualitas Aset, Bank menerapkan batasan ketat terhadap pengakuan aset ini sebagai berikut:

1 Kredit Kualitas Lancar
Pendapatan bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar diakui sebagai "Pendapatan Bunga yang Akan Diterima" di laporan posisi keuangan dan diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

2 Kredit Kualitas Non-Performing (Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet)
Sesuai dengan ketentuan OJK, Bank dilarang mengakui pendapatan bunga secara akrual untuk kredit yang sudah tidak lancar. Oleh karena itu, saldo "Pendapatan Bunga yang Akan Diterima" yang berasal dari kredit yang mengalami penurunan kualitas menjadi non-performing harus dibatalkan (dijurnal balik) dari laporan posisi keuangan. Tagihan bunga tersebut selanjutnya dipindahkan dan dicatat pada Rekening Administratif sebagai bunga dalam penyelesaian.

3 Pemulihan Pengakuan
Pendapatan bunga yang dicatat pada rekening administratif hanya akan diakui kembali ke dalam laporan laba rugi apabila telah diterima pembayarannya secara tunai dari debitur (cash basis).

4 Penurunan Nilai
Bank juga mengevaluasi kolektibilitas dari "Pendapatan Bunga yang Akan Diterima" ini. Jika terdapat bukti objektif bahwa tagihan bunga tersebut tidak dapat tertagih, maka Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai yang sesuai sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 27.

Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diakui sebagai aset non-keuangan pada saat Bank melakukan pembayaran di muka kepada pihak ketiga untuk manfaat barang atau jasa yang akan diterima di masa depan. Pengakuan awal dilakukan sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan. Akun ini mencakup transaksi seperti sewa ruangan kantor (kantor kas/kas titipan), premi asuransi (asuransi gedung, kendaraan, atau asuransi jiwa kredit yang dibayar bank), biaya pemeliharaan perangkat lunak, dan biaya dibayar di muka lainnya.

Sesuai dengan SAK EP, biaya dibayar di muka dikurangi secara sistematis melalui pembebanan ke laporan laba rugi sebagai biaya operasional selama masa manfaat atau periode perlindungan yang relevan. Metode pembebanan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight-line method), di mana jumlah yang dibebankan setiap periode mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi atas jasa atau barang tersebut.

Untuk transaksi sewa gedung kantor, Sesuai SAK EP Bab 16 Bank mengakui pembayaran sewa di muka sebagai aset biaya dibayar di muka dan tidak mengakuinya sebagai aset tetap, kecuali jika transaksi tersebut memenuhi kriteria sewa pembiayaan. Amortisasi sewa dilakukan secara bulanan berdasarkan jangka waktu kontrak sewa yang tertuang dalam perjanjian legal.

Sejalan dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam POJK No. 7 Tahun 2024, Bank melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk memastikan bahwa nilai tercatat biaya dibayar di muka masih memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Jika terdapat indikasi bahwa manfaat tersebut tidak lagi dapat diperoleh (misalnya: pembatalan kontrak sepihak oleh vendor atau penutupan kantor kas sebelum masa sewa berakhir), maka saldo yang tidak dapat dipulihkan tersebut harus segera diakui sebagai kerugian (dihapusbukukan) pada periode berjalan.

Biaya dibayar di muka disajikan dalam kelompok "Aset Lain-lain" pada laporan posisi keuangan (neraca). Bank melakukan reklasifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa bagian biaya yang sudah menjadi beban pada periode berjalan telah dipindahkan ke laporan laba rugi secara akurat.

j. Liabilitas Segera

Kewajiban Segera merupakan kewajiban Bank Perkreditan Rakyat kepada pihak lain yang telah jatuh tempo atau menjadi segera dapat ditagih oleh pihak yang berhak, baik berdasarkan perintah pemberi amanat maupun tanpa perintah tersebut. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), Kewajiban Segera diakui pada saat timbulnya kewajiban dan disajikan sebesar nilai tercatat yang mencerminkan jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank pada tanggal pelaporan.

k. Simpanan dari pihak ketiga dan bank lain

Simpanan nasabah terdiri dari kewajiban Bank dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka milik masyarakat, sedangkan Simpanan dari Bank Lain merupakan dana yang diterima dari bank lain dalam bentuk tabungan atau deposito untuk tujuan penempatan dana antar bank. Seluruh simpanan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan SAK EP Bab 11.

Simpanan diakui pada saat Bank menerima dana tunai atau pemindahbukuan dari nasabah atau bank lain sebesar nilai nominal yang diterima. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, diperlakukan sebagai pengurang nilai tercatat simpanan dan diamortisasi selama jangka waktu simpanan menggunakan Metode Suku Bunga Efektif (EIR).

Simpanan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Beban bunga diakui secara akrual dalam laporan laba rugi pada setiap periode pelaporan dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang mencerminkan nilai waktu uang. Sesuai dengan POJK No. 7 Tahun 2024, Bank wajib melakukan penatausahaan saldo simpanan secara akurat, termasuk penghitungan bunga yang menjadi hak nasabah secara tepat waktu.

Sejalan dengan standar perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian dalam POJK No. 7 Tahun 2024, Bank wajib mengungkapkan saldo simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank juga wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai tingkat bunga penjaminan yang berlaku. Simpanan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan (seperti saldo yang melebihi batas maksimal penjaminan atau suku bunga yang melebihi tingkat bunga penjaminan LPS) diungkapkan secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari manajemen risiko likuiditas.

l. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan kewajiban Bank yang berasal dari bank lain, lembaga keuangan, atau pihak lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan penyaluran kredit. Sesuai dengan SAK Entitas Privat (SAK EP), pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat dana diterima dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate). Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi selama jangka waktu pinjaman berdasarkan metode suku bunga efektif. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan sebagai liabilitas jangka panjang apabila jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Perjanjian pinjaman umumnya memuat ketentuan mengenai jangka waktu, tingkat suku bunga, jadwal pembayaran pokok dan bunga, serta persyaratan tertentu (covenant). Apabila terdapat jaminan atas pinjaman tersebut, Bank mengungkapkan jenis dan nilai tercatat aset yang dijaminkan dalam catatan atas laporan keuangan. Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan Bank telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman, kecuali diungkapkan lain dalam laporan keuangan.

m. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-lain merupakan kewajiban Bank Perkreditan Rakyat kepada pihak lain yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban utama, yang timbul dari aktivitas operasional maupun non-operasional Bank. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), Kewajiban Lain-lain diakui pada saat timbulnya kewajiban dan disajikan sebesar nilai tercatat yang mencerminkan jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank pada tanggal pelaporan.

2025

Kewajiban Imbalan Kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja sebagai liabilitas pada saat karyawan telah memberikan jasanya kepada Bank selama periode akuntansi. Sesuai dengan SAK EP Bab 28, imbalan kerja diklasifikasikan menjadi imbalan jangka pendek dan imbalan pasca-kerja. Imbalan jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, dan bonus harian, diakui sebagai beban pada saat jasa diberikan. Imbalan pasca-kerja diakui untuk memenuhi kewajiban hukum Bank atas pemutusan hubungan kerja, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat tetap.

Bank mengukur kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Perhitungan ini mencakup kompensasi atas:

1 Pesangon dengan perkalian sesuai alasan pemutusan hubungan kerja (pensiun, efisiensi, dan lain-lain).
2 Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sesuai masa kerja yang telah ditempuh.
3 Uang Penggantian Hak (UPH) yang mencakup cuti tahunan yang belum diambil dan biaya ongkos pulang (jika relevan).
4 Kompensasi bagi karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani.

Sesuai dengan ketentuan SAK EP, Bank menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti menggunakan metode Projected Unit Credit (PUC). Perhitungan ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan estimasi variabel di masa depan, termasuk tingkat kenaikan gaji, tingkat perputaran karyawan (turnover), tingkat mortalitas berdasarkan Tabel Mortalita Indonesia (TMI) terbaru, serta usia pensiun normal. Nilai kewajiban didiskon menggunakan tingkat diskonto yang mengacu pada imbal hasil (yield) obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan.

2024

Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan bank atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:
1. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek.
2. Kewajiban imbalan pasca kerja
3. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya.
4. Kewajiban pesangon pemutusan kerja.

Pada tahun 2024 Bank telah membentuk imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja" dan sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bank Perekonomian Rakyat telah membentuk cadangan imbalan pasca kerja sebesar Rp. 503.016.253,- . Selain itu pada posisi 31 Desember 2024 bank juga sudah mengikutsertakan karyawannya kedalam program JHT dan JP dengan saldo akhir sebesar Rp 719.169.944,-.

n. Pendapatan dan beban bunga

2025

Pendapatan bunga diperoleh dari penanaman dana bank pada aset produktif, berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate/EIR), yaitu metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi atas aset keuangan serta mengalokasikan pendapatan bunga selama jangka waktu instrumen keuangan yang bersangkutan.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Pendapatan bunga – provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Saldo pendapatan provisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan aset produktif yang ditanggung oleh bank. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung bank diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas aset "non-performing" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non performing. Pendapatan bunga atas aset non performing yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

2024

Pendapatan bunga diperoleh dari penanaman dana bank pada aset produktif, berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Pendapatan bunga – provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Saldo pendapatan provisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan aset produktif yang ditanggung oleh bank. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung bank diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas aset "*non-performing*" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non performing. Pendapatan bunga atas aset non performing yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah dan *cash back* , yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Beban diakui pada saat terjadinya (Basis Akrual).

o. Pendapatan provisi

Pendapatan provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau pinjaman yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat realisasi kredit. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

p. Perpajakan

2025

Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (UU HPP), sementara aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui berdasarkan perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan sesuai SAK EP Bab 29. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dikompensasikan.

Bank mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan atas seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dengan dasar pengenaan pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak tangguhan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan (probable) bahwa laba kena pajak pada masa mendatang akan tersedia untuk dimanfaatkan sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat direalisasikan, dan nilai tercatatnya ditelaah kembali pada setiap akhir periode pelaporan untuk memastikan kecukupan laba kena pajak di masa depan. Perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan pada Bank terutama berasal dari perbedaan metode dan masa manfaat penyusutan aset tetap antara komersial dan fiskal, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit sesuai standar akuntansi yang belum sepenuhnya dapat dikurangkan secara fiskal, serta pengakuan liabilitas imbalan kerja.

2024

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Bank tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

4 KAS

	2025	2024
Kas	76.189.800	46.375.000
Jumlah Kas	76.189.800	46.375.000

5 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2025	2024
Giro :		
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - 798	112.367.022	74.323.079
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur - 131	4.345.115	4.645.115
PT. Bank Danamon - 780	1.916.435.620	1.955.738.339
PT. Bank Permata Tbk. - 636	1.757.504.629	1.851.585.380
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.828.630.409	243.685.238
Jumlah Giro	5.619.282.795	4.129.977.151
Tabungan:		
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - 892	45.298.233	58.305.238
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Bisnis) - 556	1.706.962.735	1.820.861.325
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur - 945	1.869.216.260	1.936.600.102
PT. Bank Permata Tbk. - 748	41.703.557	114.529.858
PT. BPR Jawa Timur - 951	1.773.832.345	1.937.906.782
PT. BPR Surya Artha Utama - 985	412.236.785	30.636.137
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) - 102	1.347.949.217	765.074.334
PT. BPR Bank Jombang Perseroda - 004	644.944.527	70.856.915
PT. BPR Bank Jombang Perseroda - 100 (Tab. Simar)	110.891.910	101.217.700
PT. BPR Danaputra Sakti - 001	340.137.599	35.724.995
PT. BPR Delta Artha (Perseroda) - 317	803.622.310	178.692.871
PT. BPR Kridadhana Citranusa - 901	1.996.589.539	77.063.363
PT BPR Kawan	57.563.468	0
PT BPR Mitra Catur	1.885.708.455	0
PT BPR Bank Kertiawan	378.310.067	0
Jumlah Tabungan	13.414.967.007	7.127.469.620
Deposito:		
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	30.000.000	30.000.000
PT. Bank Danaputra Sakti	1.500.000.000	1.500.000.000
PT. BPR Bank Daerah Kediri	0	1.000.000.000
PT. BPR Surya Artha Utama	1.500.000.000	1.500.000.000
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Tapin Sejahtera	1.000.000.000	0
Perumda BPR Kabupaten Cirebon	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Majatama Perseroda	500.000.000	500.000.000
PD. BPR Bahteramas Konawe	750.000.000	0
PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Perseroda	1.000.000.000	500.000.000
PT. BPR Bank Jombang Perseroda	1.100.000.000	1.100.000.000
PT. BPR Kerta Raharja	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Fianka Rezalina Fatma	0	1.000.000.000
PT. BPR Lingga Sejahtera	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Kutai Timur	500.000.000	500.000.000
Perumda BPR Bank Lumajang	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda	1.000.000.000	500.000.000
PT. BPR Kota Sukabumi	1.000.000.000	0
PT. BPR Arthaya Indotama Pusaka	500.000.000	0
Jumlah Deposito	13.880.000.000	11.630.000.000

Jumlah penempatan pada bank lain	32.914.249.802	22.887.446.771
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	0	0
Jumlah penempatan pada bank lain bersih	**32.914.249.802**	**22.887.446.771**
Suku bunga Giro per tahun	0,25% - 1,0%	0,25% - 1,0%
Suku bunga tabungan per tahun	0,5% - 3,0%	0,5% - 3,0%
Suku bunga Deposito per tahun	3,9% - 7,0%	5,5% - 7,0%

Kolektibilitas penempatan pada bank lain pada 31 Desember 2025 dan 2024 masih dalam kategori lancar

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain

Saldo awal	0	0
Pembentukan di Tahun Berjalan	44.041	132.506
Penyesuaian CKPN	(44.041)	(132.506)
Saldo akhir	**0**	**0**

6 KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis Penggunaan

Kredit Yang Diberikan - Baki Debet	2025	2024
Kredit Angsuran Modal Kerja	6.604.512.667	4.895.294.638
Kredit Angsuran Investasi	2.491.952.122	2.209.320.945
Kredit Angsuran Konsumtif	6.109.220.511	7.826.268.848
Kredit Tetap Modal Kerja	9.429.270.453	7.598.504.999
Kredit Tetap P2P Lending	7.254.731.339	16.610.223.384
Kredit Rekening Koran	2.185.249.985	203.144.136
Kredit UMMA	504.416.393	452.329.749
Kredit Angsuran Haji dan Umroh	0	18.749.998
Kredit Haji dan Umroh	71.649.056	0
Kredit Kepemilikan Emas (KREMAS)	28.584.319	0
Jumlah kredit yang diberikan	34.679.586.845	39.813.836.697
Kredit Yang Diberikan - Baki Debet Efektif		
Kredit Angsuran Modal Kerja	139.677.832	0
Kredit Angsuran Investasi	33.728.779	0
Kredit Angsuran Konsumtif	98.141.581	0
Kredit Tetap P2P Lending	351.784	0
Kredit UMMA	13.783.121	0
Kredit Angsuran Haji dan Umroh	(66)	0
Kredit Kepemilikan Emas	1.722.829	0
	287.405.860	0
Jumlah kredit yang diberikan	34.966.992.705	39.813.836.697
Biaya transaksi belum diamortisasi	7.181.138	9.757.729
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(321.865.546)	(358.906.604)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit individual	(104.795.318)	0
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit kolektif	(1.990.403.364)	(1.185.158.941)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	32.557.109.615	38.279.528.881

b. Keterkaitan

	2025	2024
Pihak terkait	574.399.389	285.673.606
Pihak tidak terkait	34.392.593.316	39.528.163.091
Jumlah kredit yang diberikan	34.966.992.705	39.813.836.697
Biaya transaksi belum diamortisasi	7.181.138	9.757.729
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(321.865.546)	(358.906.604)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit individual	(104.795.318)	0
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit kolektif	(1.990.403.364)	(1.185.158.941)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	32.557.109.615	38.279.528.881

c. Kolektibilitas

	2025	2024
Pihak tidak terkait :		
Lancar	28.654.268.158	33.187.324.894
Dalam Perhatian Khusus	1.284.808.417	4.558.899.641
Kurang Lancar	897.363	71.749.052
Diragukan	1.703.294.735	41.391.120
Macet	3.323.724.032	1.954.471.990
Jumlah kredit yang diberikan	34.966.992.705	39.813.836.697
Biaya transaksi belum diamortisasi	7.181.138	9.757.729
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(321.865.546)	(358.906.604)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit individual	(104.795.318)	0
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit kolektif	(1.990.403.364)	(1.185.158.941)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	32.557.109.615	38.279.528.881

Pada 1 Januari 2025 BPR menerapkan SAK Entitas Privat yang menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dalam standar tersebut, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate/EIR) serta pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan pendekatan penurunan nilai yang diatur dalam SAK EP. Sebagai konsekuensi dari penerapan awal SAK EP, Bank melakukan penyesuaian terhadap saldo awal kredit yang diberikan, provisi, dan CKPN pada tanggal 1 Januari 2025. Penyesuaian tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan nomor 31 huruf c.

d. Perubahan penyisihan penghapusan kredit yang diberikan

	2025	2024
Saldo awal	1.185.158.941	1.088.845.597
Penyisihan penghapusan kredit selama tahun berjalan	1.232.842.741	452.994.932
Penghapusan kredit yang diberikan	0	0
Penyesuaian saldo awal CKPN	457.017.541	0
Pemulihan penghapusan kredit yang diberikan	(779.820.541)	(356.681.588)
Saldo akhir	2.095.198.682	1.185.158.941
Suku bunga kredit yang diberikan per tahun	6,0% flat - 24% flat 7,5% eff - 27% eff	6,0% flat - 24% flat 7,5% eff - 27% eff

Kredit yang diberikan tersebut dijamin dengan agunan berupa barang tidak bergerak yang diikat dengan hak tanggungan (APHT) atau kuasa untuk membebankan hak tanggungan (SKMHT), serta agunan berupa barang bergerak (kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan lebih) yang diikat dengan fidusia (Sertifikat Fidusia) dan legallisasi perjanjian kredit. atau dengan jaminan lain yang dapat diterima oleh bank.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

7 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2025	2024
AYDA	1.033.190.707	1.340.447.932
J u m l a h	1.033.190.707	1.340.447.932

Agunan yang diambil alih terdiri dari sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Action Plan Penyelesaian AYDA Tahun 2025 No. 618/UM.KP/423.500.02/2025 tanggal 16 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

1.	Nama	:	Djali
	Alamat	:	Sekarsono 1 RT.002 RW.005 Sekargadung, Purworejo, Kota Pasuruan
	Baki Debet	:	Rp64.164.808
	AYDA	:	Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Siti Rohmah tanggal 03 Agustus 2009, Seluas 87 m2.

2.	Nama	:	R Wirawan Arya Timur
	Alamat	:	Jl Raya Ranggeh No 11 RT 01 RW 03 Ranggeh Kab Pasuruan
	Baki Debet	:	Rp67.151.511
	AYDA	:	Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 00651 atas nama R Wirawan Arya Timur tanggal 15 Maret 2017, Seluas 88 m2.
3.	Nama	:	Imron Rosadi
	Alamat	:	Jl Sultan Agung Gg 1 No 4 22 RT 02 RW 02 Krampyangan Kota Pasuruan
	Baki Debet	:	Rp149.731.397
	AYDA	:	Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Imron Rosadi tanggal 03 Juni 2013, Seluas 117 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 838 atas nama Muchamad Soim tanggal 03 Juni 2013, Seluas 94 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 837 atas nama Muchamad Soim tanggal 03 Juni 2013, Seluas 100 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 836 atas nama Muchamad Soim tanggal 03 Juni 2013, Seluas 96 m2.
4.	Nama	:	Gumar Eko Prahargo
	Alamat	:	Wonogiri RT 02 RW 02 Tunggal Pager, Mojokerto
	Baki Debet	:	Rp433.332.332
	AYDA	:	Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01651 atas nama Gumar Eko Prahargo tanggal 07 Desember 2020, Seluas 400 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01652 atas nama Gumar Eko Prahargo tanggal 07 Desember 2020, Seluas 335 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01665 atas nama Gumar Eko Prahargo tanggal 21 September 2021, Seluas 325 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Haak Milik Nomor 01666 atas nama Gumar Eko Prahargo tanggal 21 September 2021, seluas 343 m2 Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01667 atas nama Gumar Eko Prahargo tanggal 21 September 2021, Seluas 358 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01669 atas nama Gumar Eko Prahargo tanggal 21 September 2021, Seluas 350 m2.
5.	Nama	:	PT. Runinco Bumi Lestari
	Alamat	:	Jl. Wonorejo No. 49 Gunung Kidul, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
	Baki Debet	:	Rp318.810.659
	AYDA	:	Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 2891 atas nama Nofrina tanggal 9 Oktober 1995, Seluas 759 m2. Sebidang tanah bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 4438 atas nama Nofrina tanggal 30 April 2002, Seluas 322 m2. Alat Berat atas nama PT. Runinco Bumi Lestari, jenis Articulated Dump Truck, No ADT45-821835, ADT45-821836, OL4E01197,OL4E01196.

8 ASET TETAP

	2025	2024
Harga perolehan:		
Gedung	184.169.000	184.169.000
Inventaris kantor	851.491.609	832.168.609
Kendaraan	1.083.010.000	1.083.010.000
Inventaris lainnya	13.842.000	13.842.000
J u m l a h	2.132.512.609	2.113.189.609

Akumulasi penyusutan:		
Gedung	172.244.237	163.035.785
Inventaris kantor	792.266.556	758.590.741
Kendaraan	723.714.160	646.451.656
Inventaris lainnya	8.939.594	5.479.106
J u m l a h	1.697.164.547	1.573.557.288
Nilai Buku:		
Gedung	11.924.763	21.133.215
Inventaris kantor	59.225.053	73.577.868
Kendaraan	359.295.840	436.558.344
Inventaris lainnya	4.902.406	8.362.894
J u m l a h	435.348.062	539.632.321

9 ASET TIDAK BERWUJUD

	2025	2024
Harga perolehan:		
Software Program SIPT	62.469.300	62.469.300
Mobile Banking	17.464.000	17.464.000
Program Assist	72.150.000	72.150.000
Program ASSIST MPP	5.550.000	5.550.000
Aplikasi RBB	5.500.000	0
J u m l a h	163.133.300	157.633.300
Akumulasi Amortisasi :		
Software Program SIPT	61.035.940	59.661.437
Mobile Banking	15.717.564	13.971.168
Program Assist	20.442.500	13.227.500
Program ASSIST MPP	1.248.750	693.750
Aplikasi RBB	343.749	0
J u m l a h	98.788.503	87.553.855
Nilai Buku :		
Software Program SIPT	1.433.360	2.807.863
Mobile Banking	1.746.436	3.492.832
Program Assist	51.707.500	58.922.500
Program ASSIST MPP	4.301.250	4.856.250
Aplikasi RBB	5.156.251	0
J u m l a h	64.344.797	70.079.445

10 ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Bunga yang akan Diterima Kredit	282.534.666	411.492.925
Pendapatan Bunga yang akan Diterima Penempatan :		
Deposito	30.584.741	27.362.606
Pajak Dibayar Dimuka :		
Pajak Dibayar Dimuka Pph Pasal 25	0	0
Biaya Dibayar Dimuka :		
Sewa Gedung	57.457.500	45.966.000
Gugatan Sederhana	42.498.000	53.384.000
Premi Asuransi - Inventaris Kendaraan	0	8.165.206
Premi Asuransi - Gedung	0	644.655
Jaringan	1.166.750	8.089.466
BDD TL Debitur	64.687.500	48.880.000
BDD Jasa Konsultan	2.250.000	0

BDD SMS Banking	2.973.495	0
BDD BPJS Ketenagakerjaan	310.331	0
BDD BPJS Kesehatan	335.859	0
Lainnya :		
Persediaan Cetakan dan ATK	31.362.270	16.188.400
Persediaan Kaleng Tabungan	766.100	586.500
Persediaan Materai	260.000	350.000
Persediaan Hadiah	14.156.500	18.401.500
J u m l a h	531.343.712	639.511.258

Biaya dibayar dimuka atas gugatan sederhana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank sehubungan dengan proses penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri yang proses persidangannya masih berlangsung. Biaya tersebut antara lain meliputi biaya registrasi perkara, panjar biaya perkara, serta biaya proses persidangan sampai dengan putusan.

Selama proses persidangan berlangsung, biaya tersebut terlebih dahulu ditanggung oleh Bank dan dicatat sebagai biaya dibayar dimuka. Setelah proses perkara selesai, biaya tersebut akan direklasifikasi dan dibebankan sebagai biaya perkara sesuai dengan penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Biaya Dibayar Dimuka atas Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut:

Nama	No Rekening	Nominal
HAFIDZ	01.70.013067.001	10.884.500
SUNARYO	01.70.012378.001	13.594.000
MAKHMUDAH ZUHROH	01.72.012370.002	5.330.000
RUDY HADI DAN MASLICHA	01.72.014580.001	5.697.500
ANDRY NOVI	01.72.007445.002	5.700.000
ZAM ZAM BIBI	01.71.008240.001	324.500
JUMIATI	01.70.008785.002	160.000
Sri Wulandari	01.71.008367.002	567.500
CV Permata	01.80.017985.001	240.000
Jumlah		42.498.000

11 LIABILITAS SEGERA

	2025	2024
Liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar :		
Pajak Penghasilan pasal 21	786.722	13.109.295
Pajak Penghasilan atas bunga tabungan	4.804.132	4.562.165
Pajak Penghasilan atas bunga deposito	13.786.387	11.195.095
Pajak Penghasilan pasal 23	87.200	190.000
Titipan Nasabah	0	0
Titipan Pihak Ketiga	63.632.320	35.860.584
Titipan Asuransi	32.713.500	25.316.000
Titipan Notaris	42.600.000	10.850.000
Titipan PPOB	1.260.352	0
J u m l a h	159.670.613	101.083.139

12 SIMPANAN

	2025	2024
Tabungan:		
Tabungan SIMAS	36.828.804	237.646.571
Tabungan SIMKOT	9.173.979.185	7.818.175.456
Tabungan SIMKA	1.796.795.871	1.563.090.312
TabunganKU	1.819.965.610	2.986.213.216
Tabungan SIMAHAR	9.361.800.070	10.128.366.681
Tabungan SIMPEL	175.900.457	55.630.878
J u m l a h	22.365.269.997	22.789.123.114
Suku bunga tabungan per tahun	0,00% - 3,5%	0,00% - 3,5%

Tabungan dari pihak terkait dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti dilakukan dengan pihak tidak terkait.

Deposito berjangka:

1 Bulan	2.521.000.000	2.078.000.000
3 Bulan	5.238.000.000	5.226.000.000
6 Bulan	3.559.500.000	2.238.500.000
12 Bulan	7.412.319.709	5.408.325.135
Cashback	50.000.000	410.000.000
J u m l a h	18.780.819.709	15.360.825.135
Suku bunga deposito per tahun	2% - 6,25%	2,25% - 6,75%

Deposito berjangka dari pihak terkait dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti dilakukan dengan pihak tidak terkait.

Jumlah Simpanan	41.146.089.706	38.149.948.249

13 SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2025	2024
Tabungan		
Pihak Tidak Terkait :		
PT. BPR Bank Jombang Perseroda	352.462.411	190.407.240
PT. BPR Jawa Timur	713.942	712.152
PT. BPR Delta Artha Perseroda	2.047.111	2.032.075
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)	74.696.187	73.067.737
Jumlah Tabungan	429.919.651	266.219.204
Suku bunga simpanan dari bank lain berupa tabungan per tahun	0,25% - 3,5%	0,25% - 2,5%
Deposito		
Pihak Tidak Terkait :		
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang Perseroda	1.500.000.000	1.500.000.000
PERUMDA BPR Kota Blitar	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Kota Kediri	800.000.000	800.000.000
PT. BPR Artha Senapati	1.000.000.000	0
PT. BPR Daya Lumbung Asia	1.250.000.000	1.500.000.000
PT. BPR Harta Swadiri	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Bank Sleman (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Tanah Laut	1.250.000.000	1.250.000.000
PT. BPR Yuka Jaya	400.000.000	400.000.000
Perumda BPR Bank Kota Bogor	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Kawan	1.000.000.000	750.000.000
PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Semeru Swasti	0	500.000.000
PT. BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda)	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Indra Candra	1.800.000.000	0
Jumlah Deposito	14.000.000.000	11.700.000.000
J u m l a h	14.429.919.651	11.966.219.204
Suku bunga simpanan dari bank lain berupa deposito per tahun	5,5% - 6,5%	6,25% - 6,75%

14 PINJAMAN YANG DITERIMA

	2025	2024
PT. BPR Bank Jombang Perseroda	249.999.450	1.249.999.650
Biaya Provisi & Administrasi	(2.365.602)	(12.365.598)
Jumlah	247.633.848	1.237.634.052

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

Berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) nomor 900/194/415.51/2023 tanggal 1 Maret 2023, BPR memperoleh fasilitas pinjaman dari PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Pinjaman Lembaga Keuangan (PLK)
Tujuan	:	Modal Kerja BPR
Plafond Kredit	:	Rp 3.000.000.000,-
Skema Kredit	:	Rp 3.000.000.000,- Installment
Jangka Waktu	:	a. Jangka Waktu Penarikan : 36 Bulan b. Jangka Waktu Kredit : 26 Bulan
Suku Bunga	:	10% Efektif
Biaya Provisi dan Administrasi	:	Provisi : 0,5% & Adm : 0,5% diambil dari nilai plafond penarikan.
Agunan	:	Cessie Piutang sebesar Rp 3.647.351.279

15 LIABILITAS LAIN-LAIN

	2025	2024
Utang Bunga :		
Deposito :		
Belum Jatuh Tempo	46.150.909	36.635.208
Simpanan dari Bank lain :		
Belum Jatuh Tempo	34.349.465	29.573.924
Pinjaman yang diterima	347.226	1.736.113
PT. BPR Angga Perkasa		
Utang Pajak :		
Utang Pajak Penghasilan pasal 29	83.984.810	94.229.898
Kewajiban Imbalan Kerja	579.133.947	532.742.089
Lainnya :		
CSR	133.145.503	130.172.771
Cadangan Bunga Simahar	196.810.000	193.988.800
Lainnya	76.854.226	0
J u m l a h	1.150.776.086	1.019.078.803

16 MODAL

Pada tahun 2025 dan 2024 tidak terdapat perubahan kepemilikan saham, sehingga komposisi kepemilikan saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rosyidi, SH di Pandaan Pasuruandan telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan No. AHU-AH.01.03-0004329 Tanggal 7 Januari 2020 dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan surat OJK No.S-67/KO.0401/2020 tanggal 21 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	%	Lembar Saham	Jumlah (Rp)
Pemerintah Kota Pasuruan	99,10%	2.848	7.120.000.000
Mochammad Hasjim Asjari	0,83%	24	60.000.000
Koperasi Karyawan Perdana Kota Pasuruan	0,07%	2	5.000.000
Total	**100,00%**	**2.874**	**7.185.000.000**

17 PENDAPATAN BUNGA KONTRAKTUAL

	2025	2024
Pendapatan Bunga dari Pihak ketiga Bank:		
Giro pada bank lain	9.350.774	10.553.169
Tabungan pada bank lain	297.751.241	204.834.218
Deposito berjangka pada bank lain	796.231.545	618.005.107
Jumlah	1.103.333.560	833.392.494
Pendapatan bunga dari pihak ketiga bukan bank:		
Kredit yang diberikan	5.175.079.715	5.810.062.631
Jumlah	6.278.413.275	6.643.455.125

18 PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI KREDIT

	2025	2024
Kepada Pihak ketiga bukan bank	526.570.810	475.120.172

19 BIAYA TRANSAKSI KREDIT

	2025	2024
Kepada Pihak ketiga bukan bank	6.747.707	13.536.060

20 PENDAPATAN LAINNYA

	2025	2024
Pendapatan Jasa Transaksi	863.540	0
Penerimaan kredit yang dihapus buku	269.217.871	212.053.114
Pemulihan CKPN:		
Penempatan pada bank lain	44.041	132.506
Kredit yang diberikan	779.820.541	356.681.588
Penerimaan Kredit AYDA		
Penerimaan Bunga Kredit AYDA	116.407.200	0
Penerimaan Denda Kredit AYDA	30.905.900	0
Lainnya :		
Denda Kredit yang diberikan	109.251.841	246.080.341
Penalti deposito	4.000.000	7.571.398
Administrasi tutup rekening	4.007.583	13.769.309
Survei	3.370.000	4.095.500
Pengurusan Perkara Pengadilan	7.291.200	2.172.000
Pendapatan Fee Leader	0	5.000.000
Jumlah	1.325.179.717	847.555.756

21 BEBAN BUNGA

	2025	2024
Bunga pinjaman bank	78.866.013	179.699.363
Tabungan dari pihak ketiga bukan bank	510.309.112	496.624.660
Tabungan dari bank lain	10.614.247	4.829.513
Deposito berjangka pada pihak ketiga bukan bank	915.093.742	794.778.827
Deposito berjangka pada bank lain	916.609.619	879.754.362
Lainnya :		
Lembaga Penjamin Simpanan	97.410.096	98.485.765
Provisi pinjaman	9.999.996	9.999.996
J u m l a h	2.538.902.825	2.464.172.486

22 BEBAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	2025	2024
Penempatan pada bank lain	44.041	132.506
Kredit yang diberikan	1.232.842.741	452.994.932
J u m l a h	1.232.886.782	453.127.438

23 BEBAN PEMASARAN

	2025	2024
Promosi dan iklan	13.869.500	5.656.000
Penagihan	6.466.321	36.242.092
Penghimpunan dana	0	20.132.276
Penyaluran kredit	0	0
Edukasi, Inklusi dan Literasi	11.100.500	9.219.000
J u m l a h	31.436.321	71.249.368

24 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2025	2024
Beban Tenaga Kerja :		
Gaji dan upah :		
Gaji Karyawan	801.288.247	803.468.902
Gaji Direksi	263.844.780	220.969.762
Tunjangan Rumah direksi	13.500.000	11.590.909
Tunjangan Transport	12.000.000	12.000.000
Tunjangan Pangan	118.863.286	122.750.818
Tunjangan Jabatan	362.026.598	320.733.396
THR	143.643.873	126.320.739
Tunjangan Keluarga	105.282.319	95.952.130
Tunjangan PPh 21	84.595.250	106.352.705
Tunjangan Fungsional	71.315.909	72.645.454
Reward	42.963.250	39.947.750
Honorarium	191.920.692	98.349.881
Lainnya :		
Beban lembur	17.620.000	9.281.000
Jasa Pengabdian	41.084.309	41.653.076
Jamsostek	98.486.779	93.421.572
JPK	57.578.046	54.934.557
Insentif Karyawan	0	122.686.413
Pakaian Dinas	1.940.000	7.215.000
Makan Lembur	8.904.300	7.141.000
Pesangon dan Penghargaan	5.307.549	12.737.037
Beban pendidikan dan pelatihan	95.206.084	84.193.400
Premi Asuransi	8.809.861	10.340.219
Beban sewa :		
Gedung kantor	126.406.500	118.745.500
Peralatan	0	0
Pajak-pajak (kecuali pajak penghasilan)	35.108.810	32.021.779
Beban penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	123.607.259	122.011.339
Beban amortisasi aset tidak berwujud	11.234.648	15.763.320
Pemeliharaan dan perbaikan	56.610.972	116.927.993

Barang dan Jasa :		
Jasa Konsultan dan Audit	16.650.000	16.650.000
Perjalanan dinas	22.591.560	42.864.738
Listrik, air, dan telepon	76.292.825	74.149.623
Barang cetak dan ATK	46.860.330	54.507.850
Pengurusan Administrasi	600.000	0
BBM	43.714.600	34.124.500
Jasa pengiriman	1.745.000	2.293.700
Jasa keamanan	6.600.000	6.600.000
Jasa Kebersihan	1.200.000	1.200.000
Jasa parkir	8.373.000	5.709.600
Lainnya	0	123.000
Rapat, seminar, lokakarya	23.865.100	34.377.900
Mamin pengurus dan karyawan	16.566.100	16.817.000
Rumah Tangga perusahaan	4.968.700	7.158.500
HUT BPR	20.029.600	14.991.500
Jaminan tamu dinas	1.738.500	8.589.300
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.430.200	9.506.000
Pengurusan Perkara	27.228.700	28.617.100
Biaya Representatif Direksi	2.050.000	1.700.000
Biaya Kaleng Tabungan	2.679.400	1.883.000
SMS Masking	26.505	0
J u m l a h	3.227.359.441	3.242.018.962

25 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
SIPO OJK	29.366.636	31.271.483
Aktivitas Karyawan	54.000.542	6.731.500
Jasa Bank	5.909.700	3.303.000
Notaris	9.000.000	17.250.000
Biaya Materai	3.900.000	3.010.000
Jumlah	102.176.878	61.565.983

26 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2025	2024
Keuntungan Penjualan :		
Kendaraan Kantor	0	0
Pendapatan Non Operasional Lainnya:		
Jasa Layanan PPOB	0	580.993
Pembayaran Pengurusan Roya	2.000.000	4.900.064
Fee Asuransi	0	4.245.000
Lainnya	55.665	35.334
Jumlah	2.055.665	9.761.391
Beban Non Operasional Lainnya:		
Sanksi administrasi dan denda pajak	32.782.274	0
Asosiasi BPR	20.580.000	19.800.000
Kegiatan Sosial	500.000	1.400.000
Panitia seleksi perekrutan	0	133.210.600
Lainnya	432	0
Jumlah	53.862.706	154.410.600
Jumlah Pendapatan dan Beban non Operasional Lainnya	(51.807.041)	(144.649.209)

27 TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

	2025	2024
a. Perhitungan Pajak Penghasilan setelah koreksi fiskal :		
Laba Sebelum Pajak Manurut Laporan Laba Rugi	938.846.807	1.515.811.547
Koreksi Positif :		
Kegiatan Sosial	500.000	1.400.000
CKPN Penempatan Pada Bank lain	44.041	132.506
CKPN Kredit	1.232.842.741	452.994.932
Denda	32.782.274	0
Biaya PPh Pasal 23	2.279.331	0
Jumlah	1.268.448.387	454.527.438
Koreksi Negatif :		
Jasa Rekening Penempatan di Bank lain	0	(351.898)
Pemulihan CKPN Penempatan pada bank lain	(44.041)	(132.506)
Pemulihan CKPN Kredit	(779.820.541)	(356.681.588)
Penerimaan Kembali Hapus buku	(269.217.871)	0
Jumlah	(1.049.082.453)	(357.165.992)
Laba Setelah koreksi fiskal	1.158.212.741	1.613.172.993
Peredaran Usaha	8.125.471.760	0
Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	684.196.724	973.673.420
Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	474.016.017	639.499.573
Pajak Penghasilan terutang sesuai pasal 31 E UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan		
(50%x22%) x PKP	75.261.640	107.104.076
(22%) x PKP	104.283.524	140.689.906
Taksiran Pajak Penghasilan	179.545.164	247.793.982
Dikurangi pajak dibayar dimuka (PPh pasal 25)	(95.560.354)	(153.564.084)
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	83.984.810	94.229.898

b. Pajak Tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

	1 Januari 2025	Dikreditkan Ke Laba Rugi	31 Desember 2025
(Liabilitas) aset pajak tangguhan			
Laba (rugi) Fiskal	0	0	0
Imbalan pasca kerja	0	0	0
Penyisihan penilaian kualitas aset	0	0	0
Penyusutan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

28 INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

	2025	2024
Aset:		
Kredit yang diberikan	574.399.389	285.673.606
	1,64%	0,72%
Kewajiban :		
Tabungan	176.329.802	141.679.862
	0,79%	0,62%
Deposito berjangka	620.940.177	512.658.110
	3,31%	3,34%

29 KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	2025	2024
Kewajiban Komitmen :		
Penerusan kredit	989.876.357	1.145.745.574
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang belum ditarik	1.264.750.015	246.855.864
Kewajiban Komitmen Lainnya	5.442.036	20.721.018
Tagihan Kontinjensi :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian bunga kredit yang diberikan	976.258.655	849.946.529
Aset produktif yang dihapusbukukan	1.731.480.670	1.937.180.430
Pendapatan bunga atas kredit yang dihapus buku	789.187.008	835.732.552
Kewajiban Kontijensi :		
Kewajiban Kontijensi Lainnya	158.916.122	158.916.022
Rekening Administratif Lainnya	5.442.036	20.721.018
Jumlah	5.921.352.899	5.215.819.007

30 REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

31 DAMPAK TRANSISI KEBIJAKAN

a. Penjelasan Perubahan Kebijakan Signifikan

Bank telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2025. Penerapan ini menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan pada periode-periode sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam SAK EP Bab 35, Bank menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut secara prospektif, sehingga dampak perubahan kebijakan akuntansi diakui mulai tanggal efektif penerapan tanpa melakukan penyajian kembali atas laporan keuangan periode sebelumnya.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dasar Pengukuran

Transisi ini mengakibatkan perubahan signifikan pada metode pengukuran dan penyajian beberapa akun utama sebagai berikut:

1. Sesuai dengan SAK EP Bab 11, Bank mengubah metode pengakuan pendapatan bunga serta amortisasi provisi dan biaya transaksi dari metode garis lurus/proporsional menjadi metode suku bunga efektif. Hal ini mengakibatkan pendapatan provisi dan biaya administrasi yang diterima di muka ditangguhkan dan diakui secara sistematis selama jangka waktu kredit, sehingga mempengaruhi nilai tercatat bersih pada akun Kredit yang Diberikan.

2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
   Bank beralih dari penggunaan metode penyisihan minimum berdasarkan persentase regulator (PPKA) menjadi model kerugian yang telah terjadi (incurred loss model) berdasarkan bukti objektif penurunan nilai. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat aset terhadap nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskon.

3. Pajak Tangguhan
   Sebagai dampak dari perbedaan waktu pengakuan biaya dan pendapatan antara standar akuntansi dan ketentuan fiskal pasca transisi (khususnya terkait CKPN dan imbalan kerja), Bank mulai mengakui Aset Pajak Tangguhan sesuai dengan SAK EP Bab 29.

4. Kewajiban Imbalan Kerja
   Bank memperbarui perhitungan kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan SAK EP Bab 28 dan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), yang dihitung berdasarkan metode Projected Unit Credit oleh aktuaris independen.

c. Rekonsiliasi Saldo Awal

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut terhadap laporan posisi keuangan Bank pada tanggal transisi disajikan dalam rekonsiliasi antara saldo akhir berdasarkan SAK ETAP per 31 Desember 2024 dengan saldo awal berdasarkan SAK EP per 1 Januari 2025 sebagai berikut:

	Penyajian Sebelumnya	Penyesuaian Penyajian Kembali	Penyajian Kembali
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(1.185.158.941)	(339.230.957)	(1.524.389.898)
Kredit Yang Diberikan	39.813.836.697	334.638.538	40.148.475.235

Bank mulai menerapkan SAK Entitas Privat yang sebelumnya menggunakan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Penerapan standar akuntansi tersebut terutama berdampak pada pengukuran aset keuangan, khususnya atas kredit yang diberikan dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang sebelumnya disajikan sebagai Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA). Pada tanggal transisi, Bank melakukan penyesuaian terhadap saldo awal laporan posisi keuangan sebagai akibat perubahan metode pengukuran tersebut. Penyesuaian tersebut mengakibatkan peningkatan saldo kredit yang diberikan sebesar Rp334.638.538 yang dicatat sebagai penyesuaian terhadap pendapatan bunga, serta peningkatan penyisihan penurunan nilai kredit sebesar Rp339.230.957 yang dicatat sebagai penyesuaian beban CKPN. Dengan penyesuaian tersebut, saldo awal laporan posisi keuangan telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang baru sesuai dengan SAK EP.

d. Kepatuhan terhadap Batas Prudensial OJK

Manajemen telah mengevaluasi dampak transisi ini terhadap rasio permodalan Bank. Sesuai dengan POJK No. 7 Tahun 2024, meskipun terdapat penyesuaian pada saldo laba awal, Bank tetap memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank memastikan bahwa setiap pelampauan atau penurunan modal akibat standar baru ini tetap dalam batas toleransi risiko yang disetujui.

e. Disclosure Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan BPR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Sedangkan untuk periode perbandingan, yaitu laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Transisi Efektif per 1 Januari 2025, Perusahaan menerapkan SAK EP sebagai kerangka pelaporan keuangan utama menggantikan SAK ETAP. Manajemen memutuskan untuk menerapkan SAK EP secara prospektif dan tidak melakukan penyajian kembali (restatement) atas laporan keuangan per 31 Desember 2024.

32 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2026.

Lampiran 1

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN KUALITAS
31 DESEMBER 2025

Keterangan	2024					
	Lancar	Lancar Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:						
Modal kerja	0	0	0	0	0	0
KPR	0	0	0	0	0	0
Kepemilikan kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
Investasi	0	0	0	0	0	0
Konsumsi lainnya	574.399.389	0	0	0	0	574.399.389
Sub total	574.399.389	0	0	0	0	574.399.389
Pihak ketiga:						
Modal kerja	21.921.391.912	1.162.789.905	0	1.703.294.735	2.588.264.603	27.375.741.155
KPR	6.947.500	0	0	0	0	6.947.500
Kepemilikan kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
Investasi	1.388.410.807	11.667.946	0	0	187.160.879	1.587.239.632
Konsumsi lainnya	4.763.118.550	110.350.566	897.363	0	548.298.550	5.422.665.029
Sub total	28.079.868.769	1.284.808.417	897.363	1.703.294.735	3.323.724.032	34.392.593.316
Jumlah kredit yang diberikan	28.654.268.158	1.284.808.417	897.363	1.703.294.735	3.323.724.032	34.966.992.705
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi						(321.865.546)
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai kredit						(2.095.198.682)
Biaya Transaksi						7.181.138
Jumlah kredit yang diberikan bersih						**32.557.109.615**

Lampiran 2.

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

DAFTAR KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI DAN KOLEKTIBILITAS

31 DESEMBER 2025

No.	Sektor Ekonomi	Kode	1	2	3	4	5	Total
1	Pertanian Jagung	11110	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000
2	Pertanian Padi	11200	385.000.000	0	0	0	6.500.000	391.500.000
3	Perkebunan Tebu	11400	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
4	Peternakan Unggas	14600	42.230.368	0	0	0	0	42.230.368
5	Penangkapan Ikan Lainnya	31119	0	0	0	0	900.000	900.000
6	Pertambangan Bijih Nikel	72950	0	95.000.000	0	0	0	95.000.000
7	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	81000	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
8	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	101000	1.817.760	0	0	0	0	1.817.760
9	Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya	162100	503.999.984	0	0	0	0	503.999.984
10	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik	239200	29.501.281	0	0	0	0	29.501.281
11	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	241000	0	0	0	0	4.416.718	4.416.718
12	Industri Furnitur	310000	260.580.548	19.662.524	0	0	0	280.243.072
13	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Lainnya	410119	950.000.000	548.127.381	0	0	0	1.498.127.381
14	Konstruksi Gedung Perkantoran	410120	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
15	Konstruksi Gedung Industri	410130	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
16	Konstruksi Gedung Lainnya	410190	0	0	0	0	847.625.939	847.625.939
17	Konstruksi Jalan Raya Lainnya	421109	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000
18	Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya	422190	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
19	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	429190	975.000.000	0	0	0	0	975.000.000
20	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453000	393.087.011	0	0	0	0	393.087.011
21	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	461000	250.000.000	0	0	0	400.000.000	650.000.000
22	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	462060	0	0	0	0	1.268.869	1.268.869
23	Perdagangan Kayu	462071	208.228.307	0	0	0	13.964.846	222.193.153
24	Perdagangan Cengkeh	462092	0	0	0	0	388.072.598	388.072.598
25	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	463209	379.518.072	0	0	0	0	379.518.072
26	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	463301	0	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

DAFTAR KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI DAN KOLEKTIBILITAS

31 DESEMBER 2025

No.	Sektor Ekonomi	Kode	1	2	3	4	5	Total
27	Perdagangan Besar Tekstil	464110	333.333.320	0	0	0	0	333.333.320
28	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464900	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
29	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	465000	1.750.000.000	0	0	0	0	1.750.000.000
30	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	466309	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
31	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	466920	1.052.500.000	0	0	0	0	1.052.500.000
32	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran	466930	72.301.411	0	0	0	499.225.000	571.526.411
33	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	466950	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
34	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	466970	5.422.018	0	0	0	0	5.422.018
35	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471100	340.487.608	0	0	0	169.716.015	510.203.623
36	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	471900	810.833	11.667.946	0	0	14.623.530	27.102.309
37	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	472001	1.827.010	0	0	0	0	1.827.010
38	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473000	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000
39	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Bahan Bangunan, Cat Dan Kaca Di Toko	475200	333.333.334	0	0	0	0	333.333.334
40	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	476000	1.351.383	0	0	0	0	1.351.383
41	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit Di Toko	477100	13.998.701	0	0	0	0	13.998.701
42	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	477300	18.705.093	0	0	0	9.322.438	28.027.531
43	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	478100	58.838.268	0	0	0	76.774.533	135.612.801

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

DAFTAR KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI DAN KOLEKTIBILITAS

31 DESEMBER 2025

No.	Sektor Ekonomi	Kode	1	2	3	4	5	Total
44	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	478200	16.736.702	0	0	0	0	16.736.702
45	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	478300	2.078.492	0	0	0	8.554.540	10.633.032
46	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	478600	9.871.526	0	0	0	0	9.871.526
47	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	478800	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	478940	908.880	0	0	0	0	908.880
49	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	478990	9.333.184	0	0	0	0	9.333.184
50	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	479100	4.423.956	0	0	0	0	4.423.956
51	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	479900	113.642.389	0	0	0	0	113.642.389
52	Angkutan Darat Untuk Barang	494300	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000
53	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang	502200	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
54	Hotel Bintang	551100	541.970.778	0	0	0	0	541.970.778
55	Penyediaan Makanan Dan Minuman Lainnya	561009	314.692.420	0	0	0	34.460.456	349.152.876
56	Aktivitas Pengolahan Data	631110	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000
57	Perantara Moneter	641000	3.794.826.495	0	0	0	0	3.794.826.495
58	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	649900	917.223.333	0	0	0	0	917.223.333
59	Real Estat Perumahan Sederhana Perumnas Tipe 22 S.D. 70	681103	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000
60	Real Estat Perumahan Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe Diatas 70)	681104	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000
61	Real Estat Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	681106	275.498.641	0	0	0	0	275.498.641

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

DAFTAR KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI DAN KOLEKTIBILITAS

31 DESEMBER 2025

No.	Sektor Ekonomi	Kode	1	2	3	4	5	Total
62	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl	773090	895.833.330	0	0	0	0	895.833.330
63	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	791200	98.547.712	0	0	203.294.735	0	301.842.447
64	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855000	58.590.448	0	0	0	0	58.590.448
65	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	960009	1.893.752.123	0	0	0	0	1.893.752.123
66	Rumah Tangga Untuk Pemilikan Rumah Tinggal S.D. Tipe 21	1110	6.947.500	0	0	0	0	6.947.500
67	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	9000	5.337.517.939	110.350.566	897.363	0	548.298.550	5.997.064.418
JUMLAH			**28.654.268.159**	**1.284.808.419**	**897.366**	**1.703.294.739**	**3.323.724.037**	**34.966.992.705**

Lampiran 3

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
KUALITAS ASET PRODUKTIF
DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
31 DESEMBER 2025

No.	K e t e r a n g a n	Lancar	DPK	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I	Perhitungan Aset Produktif dan Rasio KAP						
	A. Aset Produktif						
	1. Kredit yang diberikan	28.654.268.158	1.284.808.417	897.363	1.703.294.735	3.323.724.032	34.966.992.705
	2 Surat-surat berharga	0	0	0	0	0	0
	3 Penempatan pada bank lain	32.914.249.802	0	0	0	0	32.914.249.802
	4 Jumlah aset produktif	61.568.517.960	1.284.808.417	897.363	1.703.294.735	3.323.724.032	67.881.242.507
	B. Persentase Bobot Klasifikasi	0%	0%	50%	75%	100%	0%
	C. Jumlah Aset Produktif yang Diklasifikasikan	0	0	448.682	1.277.471.051	3.323.724.032	4.601.643.765
	D. Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (IC:IA4)x100%						6,78
II	Perhitungan Kewajiban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*)						
	A. Nilai Agunan Kredit	16.088.764.996	1.111.558.556	0	28.294.735	1.693.047.667	18.921.665.954
	B. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)						
	C. Dasar Penghitungan PPKA		173.249.861	897.363	1.675.000.000	1.630.676.365	3.479.823.589
	D. Prosentase PPKAWD (sesuai POJK 1 2024)	0,5%	3,0%	10,0%	50,0%	100,0%	-
	E. Jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang Wajib Dibentuk (PPKAWD)	123.879.284	5.197.496	89.736	837.500.000	1.630.676.365	2.597.342.881
	F. Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lapbul)	52.573.935	49.815.745	121.149	324.488.925	1.668.198.928	2.095.198.682
	G. Jumlah Kekurangan Penyisihan Penghapusan						502.144.199
	H. Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif terhadap PPKAWD (IIF:IIE)x100%						80,67
	I. Prosentase Kolektibilitas Kredit Bruto	81,95%	3,67%	0,00%	4,87%	9,51%	100,00%
	J. Prosentase Kredit non Lancar (Bruto)						14,38%
	Prosentase Kredit non Lancar (Netto)						8,39%

Lampiran 4

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
31 DESEMBER 2025

No.	K e t e r a n g a n	Nominal	CKPN	Bobot Resiko	ATMR
1	Kas	76.189.800	0	0%	0
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0	0	0%	0
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	3.056.232.396	104.795.318	0%	0
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	1.033.190.707	0	0%	0
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	0	0	15%	0
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito , sertifikat deposito, tabungan dan tagihan lainnya kepada bank lain.	32.914.249.802	0	20%	6.582.849.960
7	Kredit kepada atau bagian dari kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	0	0	20%	0
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	0	0	20%	0
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	8.276.650.212	42.507.920	30%	2.470.242.688
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).	0	0	50%	0
11	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	0	0	50%	0
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	5.893.834.586	590.437	50%	2.946.622.075
13	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	9.728.558.098	60.641.022	70%	6.767.541.953
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan /atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fiducia sesuai peraturan perundang-undangan.	76.676.701	0	70%	53.673.691
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	4.111.316.682	3.155.117	100%	4.108.161.565

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
31 DESEMBER 2025

No.	K e t e r a n g a n	Nominal	CKPN	Bobot Resiko	ATMR
16	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	3.823.724.030	1.830.934.933	100%	1.992.789.097
17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	499.692.859		100%	499.692.859
18	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-		100%	0
19	Aset lain, selain angka 1s.d angka 19	531.343.712		100%	531.343.712
	J U M L A H A.T.M.R.	70.021.659.585	2.042.624.747		25.952.917.599

Lampiran 5

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
31 DESEMBER 2025

No.	Keterangan	Jumlah setiap Komponen	Diperhitungkan (%)	Jumlah
II	MODAL			
1.1	Modal Inti			
1.1.1	Modal Disetor	7.185.000.000	100%	7.185.000.000
1.1.2	Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1	Agio (Disagio)	0	100%	0
1.1.2.2	Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	100%	0
1.1.2.3	Modal Sumbangan	0	100%	0
1.1.2.4	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	100%	0
1.1.2.5	Cadangan Umum	1.906.648.854	100%	1.906.648.854
1.1.2.6	Cadangan Tujuan	626.736.094	100%	626.736.094
1.1.2.7	Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	0	100%	0
1.1.2.8	Laba (Rugi) tahun berjalan	759.301.643	100%	759.301.643
1.1.2.9	-/- Pajak tangguhan	0	100%	0
1.1.2.10	-/- Goodwill	0	100%	0
1.1.2.11	AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.11.	-/- Melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	1.033.190.707	15%	(154.978.606)
1.1.2.11.	-/- Melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	50%	0
1.1.2.11.	-/- Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	100%	0
1.1.2.12	tanah dan /atau bangunan			
1.1.2.12.	-/- Melampaui jangka waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	50%	0
1.1.2.12	-/- Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	100%	0
1.1.2.13	Properti Terbengkalai			
1.1.2.13	-/- Melampaui jangka waktu 1 s.d 3 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	15%	0
1.1.2.13	-/- Melampaui jangka waktu 3 s.d 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	50%	0
1.1.2.13	-/- Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak ditetapkan sebagai properti terbengkalai sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR	0	100%	0
1.1.2.14	-/- Selisih kurang antara CKPN dan PPKA	502.144.199	100%	(502.144.199)
	Sub total	12.013.021.497	100%	9.820.563.786
1.2	Modal Modal Inti Tambahan			
1.3	Jumlah Modal Inti	12.013.021.497		9.820.563.786
2	Modal Pelengkap			
2.1.	Cadangan revaluasi aset tetap	0	100%	0
2.2.	Penyisihan penghapusan aset produktif umum (Max 1,25% ATMR)	52.573.935	Max 1,25% ATMR	52.573.935
2.3.	Modal Pinjaman	0	100%	0
2.4.	Pinjaman subordinasi (Max 50% modal inti)	0	Max 50% modal inti	0
2.5.	Jumlah Modal Pelengkap		Max 100% modal inti	52.573.935
3	Jumlah Modal (1.15 + 2.5)			9.873.137.721
	Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum			
	Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal (-/-)			
III	MODAL MINIMUM (8% DARI ATMR)	25.952.917.599		2.076.233.408
IV	JUMLAH KEKURANGAN MODAL			0
V	Jumlah modal pelengkap	52.573.935		
	ATMR	25.952.917.599		0,20%
VI	RASIO MODAL (CAR)=(II.3:ATMR) x 100%			
	Jumlah modal	9.873.137.721		
	ATMR	25.952.917.599		38,04%
	Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR			
VII	Jumlah modal inti	9.820.563.786		
	ATMR	25.952.917.599		37,84%
	Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR			

Lampiran 6

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
RASIO PERHITUNGAN KESEHATAN BANK
31 Desember 2025

No.	Faktor Komponen Penilaian	31 Desember 2025	
		Jumlah	Rasio
I	Permodalan (CAR)		
	a. Modal	9.873.137.721	
	b. ATMR	25.952.917.599	
	c. Rasio Modal terhadap ATMR		38,04
II	Kualitas Aset Produktif		
1	a. Jumlah aset produktif yang diklasifikasikan	4.601.643.765	
	b. Jumlah aset produktif	67.881.242.507	
	c. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan thd. Aset produktif		6,78
2	a. Jumlah kredit non lancar	5.027.916.130	
	b. Jumlah kredit yang diberikan	34.966.992.705	
	c. Prosentase Kredit non Lancar		14,38
3	a. Jumlah penyisihan penghapusan aset produktif	2.095.198.682	
	b. Jumlah PPKA. yang wajib dibentuk (PPKAWD)	2.597.342.881	
	c. Rasio penyisihan penghapusan aset produktif terhadap PPKAWD		80,67
III	Rentabilitas (ROA)		
1	a. Jumlah laba sebelum pajak	938.846.807	
	b. Rata-rata volume usaha/jumlah aset	63.089.122.081	
	c. Rasio laba terhadap total aset (ROA)		1,49
2	a. Jumlah biaya operasional	7.132.762.247	
	b. Jumlah pendapatan operasional	8.123.416.095	
	c. Rasio biaya terhadap pendapatan operasional		87,80
3	a. Jumlah pendapatan bunga bersih	4.259.333.553	
	b. Rata-rata total aset produktif	62.944.061.112	
	c. Rasio pendapatan bunga terhadap aset produktif (NIM)		6,77
IV	Likuiditas (CR)		
1	a. Jumlah alat likuid	18.680.519.951	
	b. kewajiban lancar	41.305.760.319	
	c. Rasio perbandingan alat likuid dengan kewajiban lancar		45,22
2	a. Jumlah kredit yang diberikan	34.966.992.705	
	b. Jumlah dana yang diterima	41.146.089.706	
	c. Rasio perbandingan kredit terhadap dana yang diterima (menurut SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022)		84,98